



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Keynote Speech

**DISKUSI BUKU
“ANGKAT PENA DEMI DIALOG PAPUA”**

**Kerjasama
PSKP, UGM, FAKULTAS DAKWAH-UIN SUNAN KALIJAGA,
PUSHAM-UII, PUSHAM-UAJ, PSPP-UKDW,
INSTITUT DIAN/INTERFIDEI**

Yogyakarta, 20 Juni 2012

SETIAP resolusi konflik untuk menuju suasana damai selalu diawali dengan membangun saling pengertian (*mutual understanding*) terlebih dulu sebagai basis untuk menciptakan rasa saling percaya (*mutual trust*), untuk selanjutnya agar tumbuh rasa saling menghormati (*mutual respect*) di antara para pihak yang terlibat konflik.

Kesemuanya itu harus berangkat dari sebuah dialog yang tulus, jujur dan terbuka. Dalam konteks Dialog Jakarta-Papua, Pemerintah Pusat harus menunjukkan itikat baik dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) guna mengungkap kekerasan di kala operasi militer masa lalu yang merupakan pelanggaran HAM berat, sekaligus dibarengi dengan penyerahan kompensasi bagi korban atau keluarga korban yang meninggal. Pemberian kompensasi itu juga merupakan kearifan lokal masyarakat Papua, bahwa orang yang melakukan pelanggaran diharuskan membayar denda.

Rekonsiliasi untuk *Trust Building*

Lingkaran konflik dan kekerasan di tanah Papua harus secepatnya diputus. Pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) saja tidak cukup. Harus ada solusi yang menyentuh akar permasalahan.

Pengadilan HAM berat untuk kasus Papua perlu dilakukan. Selain itu, fungsi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR sangat penting dan bermanfaat untuk menyelesaikan persoalan masa lalu Papua. Langkah ini disertai dengan pelepasan tahanan politik dan pengurangan bertahap pasukan organik TNI dari Bumi Cenderawasih. Karena masalah terbesar yang pertama harus diselesaikan di Papua, adalah soal kepercayaan terhadap Jakarta melalui de-sekritisasi menuju Papua Damai. Kalau rasa percaya (*trust building*) sudah muncul, baru bisa dilakukan dialog sejarah, dialog ekonomi, atau dialog lain yang akan bermuara pada kesejahteraan rakyat Papua.

Karena pemberian otonomi khusus sebelum dikembalikannya kepercayaan itu tidak akan membawa dampak signifikan. Bahkan, otonomi khusus hanya menguntungkan elite Papua saja, tidak merata ke masyarakat luas. Otonomi khusus yang melahirkan kebijakan hanya di bidang keamanan dan ekonomi itu terbukti gagal menyejahterakan rakyat Papua. Padahal sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2011 dana otsus yang digulirkan sudah mencapai Rp. 28,3 trilyun, yang seharusnya orang Papua sudah lebih sejahtera.

Meskipun, UU No. 27 tahun 2004 tentang KKR sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi, tetapi, KKR untuk Papua masih dapat dibentuk dengan menjadikan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagai payung hukumnya. Jadi, KKR Papua bisa dilakukan tanpa membentuk KKR nasional¹. Berbagai penembakan misterius yang marak dalam beberapa bulan terakhir di Papua, pelakunya belum pernah tertangkap.

Akar Permasalahan

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan penelitian konflik di Papua pada 2004 di bawah riset kompetitif LIPI subprogram “Otonomi Daerah, Konflik, dan Daya Saing”. Pada 2004, penelitian Papua difokuskan pada pemetaan para aktor dan kepentingan mereka di Papua. Kemudian pada tahun 2005, judul dan fokus penelitian lebih bernuansa positif dengan menganalisis agenda damai dan potensi perdamaian di Papua. Selanjutnya pada 2006, penelitian Papua membahas proses *trust building* dan rekonsiliasi di Papua dan melakukan studi banding dengan upaya membangun saling percaya yang dilakukan oleh negara lain, seperti di Amerika Latin dan Afrika Selatan.

Di akhir 2008, penelitian Papua dibuat dalam sebuah buku yang dikenal dengan *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and*

¹Asvi Warman Adam, *Bentuk KKR, Baru Dialog Jakarta-Papua*, Jawa Pos National Network, 16 Juni 2012.

Securing the Future (singkatnya PRM). Intinya, tim PRM bukan hanya menghasilkan pemetaan masalah utama di Papua, namun yang utama adalah menawarkan alternatif solusi damai dan bermartabat di Papua.

Secara tidak langsung, pendekatan PRM sangat berbeda dengan berbagai pendekatan yang diterapkan di Papua yang hampir semuanya berdimensi fisik ditambah bernuansa kekerasan. Pendekatan PRM memperhatikan pula pentingnya mengatasi persoalan kemanusiaan yang dimensi nonfisik (*intangible*) yang berkembang di Papua sejak 1962 sampai sekarang.

Empat isu utama yang menjadi akar permasalahan di Papua mencakup²: **Pertama**, marjinalisasi dan diskriminasi terhadap orang asli Papua, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial-budaya. **Kedua**, pelanggaran HAM dan kekerasan negara yang sampai hari ini belum ada masalah pelanggaran HAM yang diselesaikan secara adil, termasuk juga belum berhasil diputusnya siklus kekerasan di Papua yang dilakukan negara.

Ketiga, sejarah dan status politik Papua yang terus diperdebatkan di kalangan orang Papua, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan *Act of Free Choice* pada 1962 yang menghasilkan integrasi (reintegrasi) Papua ke Indonesia. **Keempat**, kegagalan pembangunan berkaitan dengan implementasi UU Otsus Papua, terutama bila dilihat dari keberhasilan/kegagalan di empat sektor prioritas: pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pembangunan infrastruktur.

Asumsinya, dengan dana otsus yang amat besar seharusnya orang Papua sudah jauh lebih sejahtera. Namun, Papua tetap tercatat sebagai daerah paling miskin di Indonesia (Provinsi Papua 38% dan Provinsi Papua Barat 40%). Selain memetakan masalah di Papua, tim PRM juga menawarkan alternatif solusi. Warga merasa Jakarta hanya memindahkan pembangunan ke Papua, bukan untuk rakyat Papua.

Pertama, rekognisi dan pemberdayaan orang asli Papua. **Kedua**, paradigma baru pembangunan Papua. **Ketiga**, pengadilan HAM dan rekonsiliasi. Bagaimana semua ini bisa dilakukan? Selain meneruskan program-program pembangunan yang sudah/sedang berjalan, rekomendasi kebijakan yang paling penting adalah memungkinkan terjadinya dialog antara pihak-pihak yang berkonflik, baik di Papua maupun dengan Jakarta.

Saling Berkorelasi

Meskipun keempat isu utama dalam konflik Papua dapat dikategorikan secara terpisah, dalam menganalisisnya cenderung saling berkorelasi. Hal ini

²Dr. Andriana Elisabeth, *Papua Road Map: Bagian Perjalanan Damai Papua*, Septuar Indonesia, 25 November 2011.

antara lain karena rentang waktu persoalan Papua yang sudah sangat lama, namun tidak pernah coba diselesaikan secara tuntas.

Selain itu, hampir semua kebijakan dan program di Papua juga terfokus pada penyelesaian persoalan keterbatasan fisik dan infrastruktur. Padahal, pendekatan ekonomi dan infrastruktur pun tidak sepenuhnya mampu mengatasi persoalan keterbatasan dan ketertinggalan daerah Papua, sekalipun menggunakan indikator dan parameter yang terukur. Contoh yang paling nyata adalah masih buruknya fasilitas pelayanan publik di Papua, terutama pendidikan dan kesehatan. Karena masalah di Papua tidak bisa dianalisis secara terpisah, solusinya pun bersifat simultan dan terpadu, serta tidak boleh lagi mengakibatkan munculnya persoalan baru apalagi bersifat represif.

Sebagai contoh, pembukaan lahan di atas tanah adat penduduk asli Papua harus dilakukan dengan komunikasi yang terbuka dan persuasif. Jangan sampai hanya berpihak pada kepentingan investor, di mana pemerintah daerah di Papua cenderung membela kepentingan investor, serta dengan sengaja melupakan prinsip kepemilikan hak ulayat orang asli Papua.

Dialog bukan solusi, melainkan media atau forum yang disediakan untuk memulai kebuntuan komunikasi politik antara Jakarta dan Papua. Komunikasi yang lebih intens dan reguler menjadi penting dalam rangka mengatasi ketegangan, saling curiga, dan saling tidak percaya antara Jakarta dan Papua selama ini. Dialog damai bukan sesuatu yang instan, melainkan proses panjang yang harus dipersiapkan secara matang. Meskipun rumit, dialog sangat mungkin dilakukan dengan terlebih dulu menciptakan kondisi-kondisi yang membuat para pihak semakin yakin untuk berdialog.

Pertama, adalah syarat-syarat dialog, meliputi kesetaraan, keterbukaan, saling menghargai. **Kedua**, menyelesaikan akar persoalan kekerasan di Papua mencakup pembebasan tahanan politik dan narapidana politik (tapol/napol), penanganan masalah tanah (politik pertanahan), penataan aparat keamanan dan intelijen, serta penyelesaian pelanggaran HAM melalui pengadilan HAM yang adil. **Ketiga**, dialog harus dipersiapkan oleh semua pihak berkaitan dengan format dialog. **Keempat**, dialog nasional harus berdasarkan keputusan politik Pemerintah Indonesia, tanpa keputusan politik yang resmi, hampir pasti tidak akan mungkin ada dialog damai.

Tujuan utama dialog adalah untuk mengatasi masalah-masalah non-fisik yang selama ini cenderung diabaikan, seperti persoalan rekognisi terkait dengan pengalaman kekerasan dan penderitaan orang Papua (*memoria passionis*), ketidakamanan dan ketidaknyamanan karena pendekatan represif. Termasuk juga terbatasnya kebebasan politik sipil di Papua, terutama karena stigma separatis

yang melekat kuat ditujukan pada mereka yang menyampaikan perbedaan aspirasi politik dengan Pemerintah Indonesia.

Dari seluruh proses damai dan terutama untuk menuju dialog damai Jakarta-Papua, hal terpenting adalah semua pihak harus memiliki pemahaman yang sama mengenai makna dan urgensi dialog. Dialog bukan berarti Papua Merdeka, juga bukan NKRI, otsus, atau percepatan pembangunan Papua. Esensi dialog adalah media, cara berkomunikasi bagi para pihak untuk mulai membuka diri, memandang pihak lain secara setara dan bermartabat, serta keinginan baik untuk mau duduk bersama membicarakan isu-isu yang selama ini menjadi sumber perpecahan, ketegangan, konflik, dan asal-muasal kekerasan di Papua.

Konflik yang terjadi di Papua saat ini, kata Adriana, bukanlah konflik horizontal, melainkan mutlak konflik vertikal antara pemerintah dan masyarakat. Kekerasan yang muncul adalah bagian dari tidak terselesaikannya konflik kedua kubu. Penghentian kekerasan itu wajib. Jika tidak dihentikan, apapun yang terjadi, sekecil apapun isu di Papua akan berubah menjadi isu politik. Usul dialog itu terinspirasi dari warga Papua sendiri. Mereka punya budaya menyelesaikan masalah dengan dialog. Orang pesisir menyebutnya '*para-para*' ajang untuk menceritakan apa pun yang menjadi kegelisahan.

Lima Strategi Pemerintah

Papua dicanangkan pemerintah menjadi tanah damai (*Papua, Land of Peace*) sejak 2004 lalu. Karenanya, pemerintah akan mengedepankan pendekatan yang damai, dialog, dan bermartabat dalam mengelola Papua. Lima posisi dasar pemerintah bagi Papua adalah, **pertama**, menguatkan kedaulatan NKRI dengan tetap menghormati keragaman dan kekhususan rakyat dan wilayah Papua. **Kedua**, menata dan mengoptimalisasi pelaksanaan UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua.

Ketiga, melakukan *affirmative policies* sebagai sebuah diskriminasi positif dan rekognisi atas hak-hak dasar rakyat Papua, seperti akses ke perguruan tinggi bermutu, karier di birokrasi dan TNI/Polri, maupun pengusaha asli Papua. **Keempat**, mendesain strategi, kebijakan, dan program, termasuk pembiayaan guna percepatan pembangunan wilayah dan pemberdayaan rakyat Papua. **Kelima**, mengedepankan penghormatan atas HAM dan mengurangi tindak kekerasan, baik yang dilakukan kelompok-kelompok separatis Papua maupun yang dilakukan oleh oknum aparat negara diluar batas kepatutan.

Pejabat pemerintah pusat, terdiri atas Menko Polhukam Joko Suyanto, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, dan Kepala BIN Marciano Norman mengunjungi Papua menyusul situasi keamanan di Papua yang tidak kondusif beberapa hari terakhir. Mereka

melakukan serangkaian pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat Papua di Jayapura, Timika, dan Manokwari. Kunjungan ini membawa nilai kesejukan.

Pertemuan itu merupakan komunikasi konstruktif dari Jakarta kepada rakyat Papua, dengan menyepakati beberapa hal. **Pertama**, Papua Tanah Damai adalah komitmen dan tugas bersama, baik pemerintah maupun rakyat Papua. Pemerintah serius untuk mengungkap kasus-kasus penembakan yang terjadi di tanah Papua. **Kedua**, seiring dengan perkembangan kemajuan di Papua dalam 10 tahun terakhir ini membawa dampak pula dalam perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat. Tantangan kita adalah mengelola relasi sosial yang harmonis antar kelompok-kelompok sosial di tanah Papua, termasuk relasi rakyat Papua dan pemerintah.

Ketiga, disepakati pula bahwa Otonomi Khusus perlu dipertahankan. Namun, diperlukan perbaikan dalam level implementasi. Untuk itu, simpul-simpul yang masih macet di level pusat dan di daerah perlu dipecahkan. Tokoh-tokoh masyarakat menyoroti perlu percepatan peraturan-peraturan pendukung Otonomi Khusus. Demikian juga, MRP, DPRP, dan Gubernur untuk menyelesaikan regulasi-regulasi khusus di level lokal yang bersifat *affirmative action*. Hal itu sebagai tanggung jawab daerah, dan Jakarta tidak bisa mengintervensi kewenangan daerah.

Keempat, disepakati bahwa pemerintah telah memiliki kebijakan yang komprehensif dalam menangani Papua. Untuk mempertajam desain ini, para tokoh masyarakat mengharapkan pendekatan kemanusiaan dikedepankan agar rakyat Papua menjadi subyek pembangunan. **Kelima**, terkait aspirasi Dialog Jakarta-Papua, pemerintah mendengar dan mengkaji aspirasi dan usulan tersebut. Presiden terbuka untuk berdialog dengan tokoh-tokoh rakyat Papua, termasuk kelompok-kelompok separatis di hutan-hutan. Kita semua adalah keluarga besar yang bisa saling berkomunikasi secara konstruktif dalam payung NKRI, Otonomi Khusus, dan percepatan pembangunan.

Sesungguhnya kesepakatan ini merupakan penegasan dari konsistensi sikap Pemerintah yang sudah digariskan sebelumnya dalam Lima Strategi Pemerintah dalam memantapkan posisi dasar sebelumnya. Sekarang ini, tinggal menunggu political action Presiden untuk berdialog langsung dengan representasi masyarakat Papua, yang meliputi lima kelompok, yakni Orang Papua di Indonesia; Penduduk Papua di tanah Papua (rakyat, pemerintah dan swasta); Orang Papua yang hidup di luar negeri, Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM)³.

³Rachmadin Ismail, *5 Kesepakatan Hasil Dialog Pemerintah Pusat-Tokoh Papua*, detikNews, 19 Juni n2012.

Catatan Akhir

50 tahun lalu Papua lepas dari kekuasaan Belanda, kemudian dalam proses cukup lama yang berakhir dengan suatu “jajak pendapat” masuk ke dalam Republik Indonesia. Akan tetapi sampai sekarang Papua tetap tidak tenang. Sampai hari ini kontroversi ibarat seperti api dalam sekam, apakah jajak pendapat itu betul-betul sebuah *act of free choice* atau sebenarnya sebuah *act free of choice*. Rakyat Papua berkesan semakin kehilangan harapan akan suatu masa depan secara manusiawi dan terhormat dalam pangkuan NKRI.

Tidak mengherankan bahwa dalam situasi ini pelbagai pihak justru mengambil sikap yang keras, tanpa kompromis, dengan kesediaan untuk mencoba menyelesaikan masalah-masalah yang sangat kompleks itu dengan kekerasan. Padahal kekerasan bukan jalan keluar. Kalau suatu bagian rakyat hanya dapat dipertahankan dalam kesatuan negara dengan cara kekerasan dan penindasan, maka negara itu sebenarnya sudah kehilangan mereka.

Situasi di Papua sekarang mendekati keadaan seperti itu. Dalam situasi itu buku RamaDr. Neles Tebay ini bagaikan embun yang menyejukkan. Tahun 1992 ketika beliau ditahbiskan sebagai imam dalam Gereja Katolik, ia diberi nama adat “*Kebadabi*” yang dalam bahasa *Mee* berarti “*orang yang membuka pintu atau jalan*”. Buku ini membuktikan Neles Tebay sebagai seorang pembuka pintu dan penunjuk jalan. Neles Tebay menunjukkan bahwa Papua yang damai, maju dan gembira, itu pun dalam kesatuan dengan Indonesia, masih mungkin. Sejak 12 tahun lalu, Neles Tebay secara konsisten menyuarakan moderasi, sikap tahu diri dan sekaligus secara konsisten menuntut agar rakyat Papua memperoleh haknya.

Suara Neles Tebay adalah suara perdamaian, ia menolak kekerasan “*entah apa pun motivasi dan tujuannya*”. Yang menjadi tujuan Neles Tebay adalah memajukan dialog Jakarta-Papua. Malu kita membaca bahwa selama sembilan tahun pemerintah pusat dan aparatnya mencurigai kata “*dialog*” hanya karena kata ini menjadi kata kunci dalam Kongres Papua II di tahun 2000. Baru setelah Bapak Presiden memberikankomitmen Jakarta terhadap dialog dengan Papua, kata dialog berbalik menjadi mantra sakti. *Political will* sudah ada, kini yang ditunggu tinggal *political action Presiden*, sebagaimana diharapkan oleh Komisi I Bidang Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi Dan Informasi dan Komisi III Bidang Hukum, Perundang- Undangan, HAM dan Keamanan seusai kunjungan kerjanya ke Papua.

Karena itu buku ini penting, kalau dicari pemecahan positif-damai “*masalah Papua*”. Judul-judul seperti “*menyelesaikan konflik Papua*”,

“*mengubah Papua menjadi tanah damai*” atau “*mempersiapkan dialog*” memperlihatkan betapa kosakata DIALOG selalu menjadi tema sentral buku ini.

Neles Tebay adalah suara perdamaian yang menunjukkan bahwa masih ada masa depan yang positif bagi Papua dalam persatuan dengan Indonesia. Kedua belah pihak yang sering berhadapan, para tokoh dan pemerhati Papua maupun “orang-orang Jakarta”, diharapkan membaca buku ini – dan lantas melibatkan diri dalam proses dialog dan komunikasi. Proses komunikasi dialogal merupakan satu-satunya cara untuk keluar dari jalan buntu sekarang di mana kekerasan adalah satu-satunya bahasa yang dipakai, bahasa antara dua pihak yang sama-sama tuli yang hanya dapat berakhir di jalan buntu.

Demikianlah alur pikir Rama Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno SJ dalam kata pengantar buku *Angkat Pena Demi Dialog Papua* yang merupakan kumpulan 54 Artikel Opini tentang Dialog Jakarta-Papua Tahun 2001-2011 oleh Neles ‘Kebadabi’ Tebay ini.

Yogyakarta, 20 Juni 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X